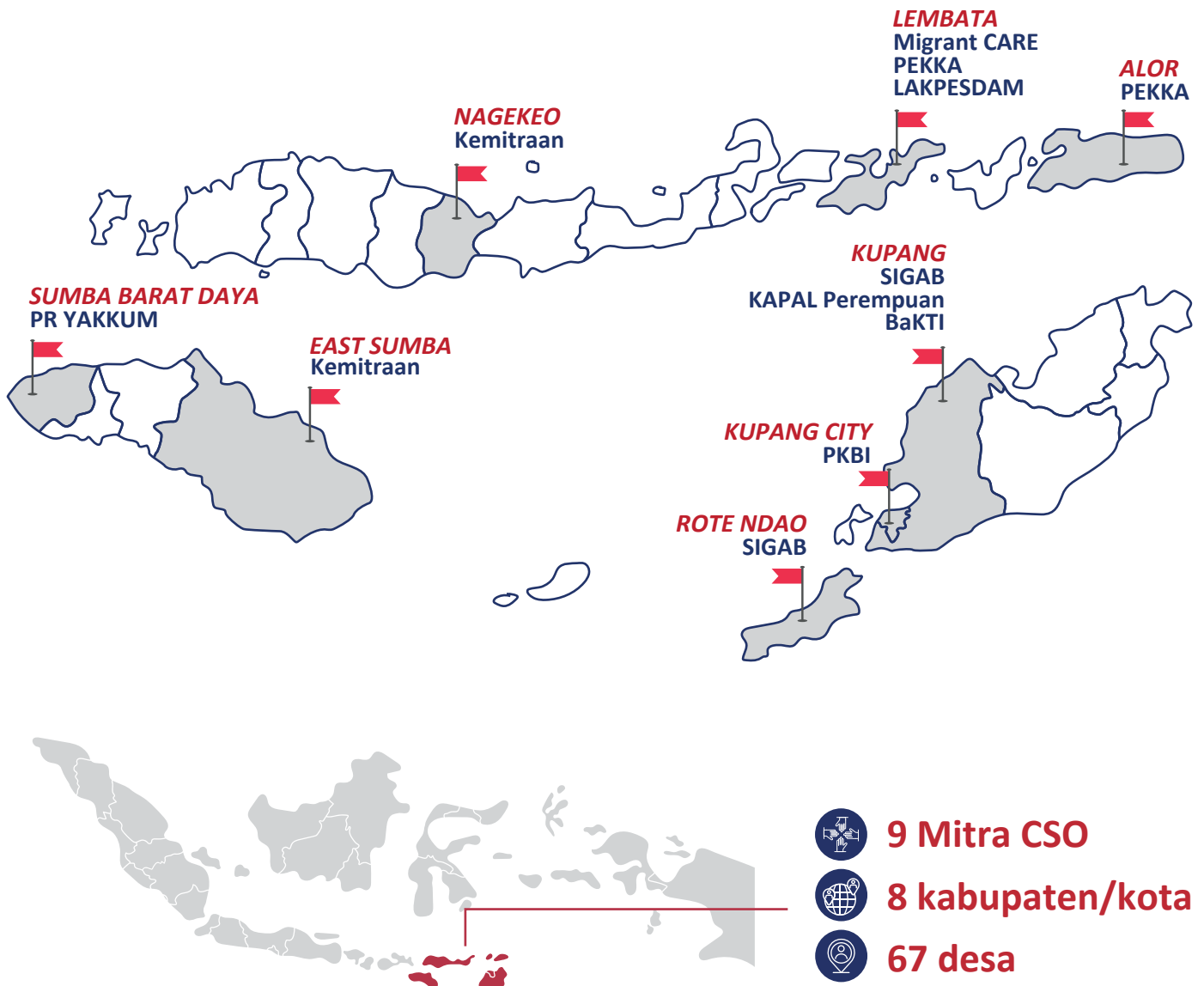


# INKLUSI di Nusa Tenggara Timur (NTT)

NO-ONE IS LEFT BEHIND

INKLUSI bekerja sama dengan 9 organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN), dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM, untuk memajukan kerja-kerja mereka untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi di dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi di dalam perekonomian.



Para mitra masyarakat sipil ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh bukti, pembelajaran, dan pengalaman kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berdampak pada mereka.



Mitra lokal SIGAB, **Garamin**, melaksanakan **Program SOLIDER** di **15 desa** di **Kupang** dan **Kabupaten Rote Ndao** untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas.

Garamin berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, jaringan disabilitas, dan pemangku kepentingan kunci lainnya dalam penyusunan **Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) NTT** untuk memenuhi komitmen pemerintah untuk mewujudkan inklusi disabilitas sesuai UU Disabilitas Nasional Tahun 2016.

Di tingkat desa, Garamin membentuk **kelompok disabilitas desa** untuk meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini mengadvokasi dan berkolaborasi dengan pemerintah desa dan kabupaten untuk melaksanakan undang-undang dan mengakses dana untuk membuat layanan, program, dan fasilitas pemerintah lebih mudah diakses (aksesibel). Hal ini meliputi akses ke pendidikan umum (arus utama) maupun tertarget, perlindungan sosial, dan jaminan kesehatan nasional - penerima bantuan iuran (JKN-PBI), serta layanan-layanan untuk melindungi dan mencegah kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

**Kelompok disabilitas Garamin meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas di bidang ekonomi.** Para anggota Garamin mengadvokasi akses ke dana desa untuk meningkatkan keamanan pangan dan mendukung usaha kecil, dan bekerja sama dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Disnaker untuk menghubungkan para penyandang disabilitas dengan pemberi kerja, pelatihan, dan peluang kerja.

## Pusat Rehabilitasi YAKKUM

Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM) bekerja untuk memajukan hak-hak para penyandang disabilitas psikososial untuk mengakses layanan, berpartisipasi secara setara dan penuh dalam keputusan terkait pembangunan, dan agar terlindung dari kekerasan.

YAKKUM bertujuan untuk mengurangi jumlah penyandang disabilitas psikososial yang dilembagakan, dengan membangun kesadaran, penerimaan, dan kapasitas keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan rehabilitasi berbasis komunitas.

YAKKUM juga bekerja sama dengan para pemberi kerja, Unit Layanan Disabilitas (ULD), dan program pemberdayaan pencaharian untuk mengurangi hambatan dan membuka akses ke lapangan kerja inklusif dan kewirausahaan inklusif.

**Mitra lokal YAKKUM, YHS**, melaksanakan **Program DIGNITY** untuk memperkuat kebijakan dan kapasitas lokal hingga nasional terkait inklusi disabilitas di **2 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya**.

## Kemitraan – Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan

Para mitra lokal Kemitraan, yaitu **Lembaga Bumi Lestari** dan **Perempuan AMAN**, bekerja di **8 desa** untuk mengadvokasi tata kelola dan hak sebagai warga yang inklusif serta perlindungan masyarakat adat dan etnis minoritas dari kekerasan di **Sumba Timur dan berbagai kabupaten di Flores**.

Lembaga Bumi Lestari memfasilitasi akses ke berbagai dokumen identitas hukum melalui dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kabupaten dan memantau distribusi berbagai program perlindungan sosial melalui pemerintah desa. Lembaga Bumi Lestari berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas untuk menyusun SOP untuk meningkatkan akses ke berbagai layanan kesehatan, termasuk vaksin, bagi masyarakat adat.

Perempuan AMAN memfasilitasi keterlibatan para perempuan masyarakat adat di dalam pemetaan sosial-ekonomi komunitas mereka melalui diskusi kelompok terfokus (FGD). Data digunakan untuk mengadvokasi hak dan kebutuhan masyarakat adat di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, serta untuk penanganan hak guna lahan. Lembaga Bumi Lestari telah memfasilitasi pembentukan **Forum Disabilitas** di 6 desa, dan Pemerintah Desa Kalamba telah mengalokasikan dana desa untuk mendukung berbagai usulan dari kelompok disabilitas Kalamba.

## Migrant CARE – Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

NTT adalah satu dari empat wilayah pengirim pekerja migran tertinggi di Indonesia. **Mitra lokal Migrant CARE, YKS, bekerja di 9 desa di Kabupaten Lembata** untuk mengadvokasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan domestik dan internasional untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, mencegah perdagangan orang, dan menjamin akses ke berbagai program perlindungan sosial.

YKS bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah seperti Disnaker Kabupaten Lembata dan BP2MI untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui model layanan desanya yang disebut dengan **DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran)**. **Kelompok buruh migran** DESBUMI memberikan layanan bagi para calon pekerja migran dan pekerja migran yang telah kembali untuk mendukung migrasi legal, memberikan pelatihan pra-keberangkatan, serta penanganan kasus dan rujukan untuk setiap pengaduan, pelanggaran hak, dan perdagangan orang. Kelompok-kelompok DESBUMI mendampingi pemerintah desa untuk mengumpulkan data tentang pekerja migran yang memerlukan akses ke layanan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. Pembelajaran dari DESBUMI telah tercermin di 6 peraturan desa di Kabupaten Lembata.

**DESBUMI juga mendukung para pekerja migran yang pulang untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif** melalui pembentukan kelompok simpan pinjam dan koperasi usaha. Para anggota melakukan survei tentang potensi ekonomi migran, mengakses pelatihan usaha melalui dinas ketenagakerjaan, dan berpartisipasi di dalam musrenbangdes untuk memperoleh pendanaan proposal usaha. Pemerintah Kabupaten Lembata mendukung perluasan DESBUMI ke desa-desa lain di kabupaten tersebut.



Kelompok wirausaha mantan pekerja migran Tokan Lota Pito DESBUMI yang telah mendirikan usaha makanan ringan.  
Foto : Migrant CARE



KAPAL Perempuan membimbing para anggota Sekolah Perempuan mengisi formulir pengumpulan data. Informasi yang dikumpulkan tersebut berkontribusi menyusun data esensial desa untuk memastikan terjadinya partisipasi inklusif di berbagai program pembangunan. Foto: KAPAL Perempuan

KAPAL Perempuan memberikan pendidikan informal melalui inisiatif **Sekolah Perempuan**. Para perempuan marginal diberdayakan dan dibangun kapasitasnya untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Mitra Lokal KAPAL Perempuan, **PEKA-PM**, melaksanakan model Sekolah Perempuan di **5 desa** di **Kabupaten Kupang**.

Melalui layanan **pos pengaduan** di **Desa Tanah Merah**, para anggota Sekolah Perempuan bekerja dengan pemerintah untuk mengumpulkan data dan menjembatani kesenjangan akses ke layanan pemerintah, seperti identitas hukum, bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas, dan tes IVA gratis. Para relawan menangani dan merujuk kasus kekerasan dan perkawinan anak, serta mengadvokasi peraturan daerah untuk melaksanakan UU TPKS dan strategi nasional (Stranas) pencegahan perkawinan anak.

PEKA-PM bekerja sama dengan sektor swasta dan Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk **membangun ketahanan ekonomi perempuan**. Upaya-upaya kolaboratif yang dijalankan mencakup pengumpulan data sosial-ekonomi; penilaian kapasitas; pembentukan kelompok usaha; memberikan akses kepada pembiayaan mikro (*micro-finance*); dan memberikan pelatihan pemrosesan makanan, produksi suvenir, *digital marketing*, dan manajemen keuangan.

Keputusan Pemerintah Kabupaten Kupang yang mengesahkan **Sekolah Perempuan Dalek Esa di Desa Oebelo** telah memberikan pendanaan untuk pelatihan produksi makanan ringan/pengangan dan manajemen keuangan.

Pemerintah Kota Kupang mendukung replikasi Sekolah Perempuan di desa-desa lainnya untuk meningkatkan jangkauan dan luasan layanan, program, dan bantuan ekonomi dari pemerintah.

## PEKKA - Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

**PEKKA** bekerja di 12 desa melalui **Serikat Pekka Kabupaten Alor** dan **Serikat Pekka Kabupaten Lembata** untuk meningkatkan akses kepada layanan untuk perempuan kepala keluarga dan kelompok marginal lainnya.

**Akademi Paradigta** PEKKA memberikan pelatihan di bidang kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan pengembangan usaha untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Banyak diantaranya adalah perempuan lansia, yang sebagian memiliki disabilitas atau merawat anak disabilitas seorang diri. Dengan berpartisipasi di musrenbangdes, para perempuan ini dapat mengatasi kesenjangan akses ke layanan yang mereka butuhkan dan memperoleh dana desa untuk terus menjalankan inisiatif usaha PEKKA. Hal ini meliputi kelompok simpan pinjam, PEKKA Mart, PEKKA Produksi, dan dihidupkannya kembali Pasar Barter PEKKA.

Keberhasilan pasar barter di Lembata membuat beberapa desa meminta Serikat Pekka untuk membantu mengkoordinasi pasar barter di wilayah mereka.

## BaKTI – Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia

BaKTI bekerja melalui mitra lokalnya, **UDN**, di **15 desa di Kabupaten Kupang** untuk menjalankan **Reses Partisipatif**, yaitu sebuah inisiatif konsultasi desa dengan DPRD. UDN bekerja erat dengan para champion dari DPRD yang ingin terlibat dalam diskusi dengan para konstituen mereka di tingkat desa. Hal ini difasilitasi melalui pembentukan dan pembangunan kapasitas **kelompok pemerhati desa** yang beranggotakan laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas yang terpilih. Para anggota mengadvokasi akses inklusif kepada layanan dasar (esensial), akses ke berbagai program lapangan kerja dan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan.

Kelompok pemerhati desa UDN bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kupang untuk menyusun SOP untuk unit-unit layanan UPTD PPA untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk kasus kekerasan seksual.

Para anggota kelompok pemerhati desa yang memiliki disabilitas telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengumpulkan data dan menyusun peraturan **Desa Inklusif**. Peraturan Desa Inklusif bertujuan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk mengakses berbagai layanan dan program pemerintah. Hal ini meliputi pendanaan untuk pembuatan jalur (*ramp*) yang aksesibel untuk kursi roda, dan mendukung keterlibatan inklusif penyandang disabilitas dalam pembangunan desa.



## PKBI – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

PKBI mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk memenuhi hak mereka untuk terbebas dari kekerasan dan memenuhi potensi maksimal mereka. **Cabang lokal PKBI bekerja di 3 desa di Kabupaten Kupang.**

PKBI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk menyusun berbagai panduan untuk penanganan, rujukan, dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Di Kupang, PKBI bekerja sama dengan **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)** di bawah Dinas Hukum dan HAM untuk melaksanakan panduan-panduan tersebut.

PKBI NTT memfasilitasi pemerintah dan penyedia layanan swasta untuk menyediakan layanan bagi anak-anak di LPKA. Hal ini mencakup layanan pendidikan dan kesehatan, konseling psikologis, dan berbagai program pelatihan keterampilan. Untuk meningkatkan akses kepada dokumen identitas hukum, PKBI menginisiasi layanan jarak jauh (*mobile service*) dari Disdukcapil yang memberikan akta lahir, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu identitas anak (KIA) bagi anak-anak dan remaja penghuni LPKA. PKBI telah memfasilitasi kolaborasi dengan DP3A Kabupaten untuk membentuk **Forum Anak** di LPKA Kupang.

PKBI dan LPKA juga telah menginisiasi **Forum Keluarga** untuk mengundang para orang tua dan staf LPKA untuk mempromosikan model *parenting* dan pengasuhan (*nurturing*) kolaboratif. Forum ini memberikan pendidikan tentang hak anak untuk mengakses berbagai layanan dan agar terbebas dari kekerasan di LPKA, membantu keluarga mempersiapkan diri untuk kembali hidup bersama anak-anak mereka, dan mendukung reintegrasi anak-anak tersebut untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran kembali.

Lakpesdam adalah sebuah lembaga di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang bekerja untuk membangun kesadaran tentang dampak perkawinan anak dan pencegahannya di Indonesia, serta mendampingi pemerintah untuk menjalankan berbagai strategi nasional dan daerah untuk pencegahan perkawinan anak.

Lakpesdam dan Fatayat NU melaksanakan survei *baseline* tentang kondisi ekonomi dan sosial-budaya lokal, yang dapat berkontribusi pada tingginya perkawinan anak, sekaligus meninjau kembali berbagai kebijakan dan praktik pencegahan dan penanganan kasus-kasus perkawinan anak di Kabupaten Lembata. Dalam proses perancangan program Lakpesdam-INKLUSI di **4 desa di Kabupaten Lembata**, dilaksanakan konsultasi dengan DP3A Kabupaten Lembata, Dinas Sosial, Bappeda, KUA, dan lembaga-lembaga lainnya.

Lakpesdam mempromosikan pencegahan dan penanganan perkawinan anak oleh multi-pemangku kepentingan yang inklusif di **lima area kunci**:



Mendorong keterlibatan keluarga, guru, dan tokoh agama dalam upaya mencegah perkawinan anak melalui kegiatan pembangunan kesadaran dan kajian keagamaan terkait pencegahan perkawinan anak.



Memperkuat peran layanan dasar, khususnya posyandu remaja, layanan bimbingan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA), dan pencatatan kasus-kasus perkawinan anak di tingkat desa dengan memberdayakan kader-kader desa.



Meningkatkan akses korban perkawinan anak ke layanan perlindungan sosial dan intervensi kekerasan.



Mengadvokasi pengembangan kebijakan di tingkat desa dan kabupaten/kota untuk pencegahan perkawinan anak.



Mempromosikan model koordinasi yang bermakna dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan yang relevan untuk pencegahan perkawinan anak, dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.

## NO-ONE IS LEFT BEHIND

*Tidak Ada Satupun yang Tertinggal*

**INKLUSI**  
Kemitraan Australia - Indonesia  
Menuju Masyarakat Inklusif

**Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, disingkat INKLUSI**, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 - 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, 129 kabupaten, dan 650 desa di Indonesia.

